

**NASKAH PUBLIKASI**

**EVALUASI KINERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN  
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DALAM  
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN  
KARIMUN**

Oleh:

Desy Pratiwi  
20150520190

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah  
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing



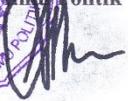
Rahmawati Husein, MCP, Ph.D.

NIK: 19650827199709 163 055

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik



Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si  
NIK: 19690822199603163038



Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si  
NIK: 19660828199403163025

# **Evaluasi Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Karimun**

**Desy Pratiwi <sup>1)</sup>**

<sup>1)</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183 Indonesia

\* Korespondensi Penulis. E-mail: desypratiwi011@gmail.com

## **Abstrak**

*Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Karimun. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan unit analisa terdiri dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Karimun, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Karimun, Dinas Penanaman Modal dan terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun, PT Trimegah Perkasa Utama dan PT Riau Alam Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertama, produktivitas BPKPBPB Karimun tidak dapat dicapai dengan maksimal karena sebagian besar program tidak terlaksana dengan baik. Kedua, kualitas layanan sudah cukup baik dari segi perilaku dan pelayanan perijinan usaha. Ketiga, responsivitas BPKPBPB dalam menanggapi keluhan masyarakat sudah baik melalui keberhasilan dalam memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keempat, tanggungjawab belum maksimal karena program tidak terlaksana sepenuhnya yang menyebabkan visi dan misi BPKPBPB Karimun belum tercapai. Kelima, akuntabilitas BPKPBPB Karimun belum maksimal karena pertanggungjawaban pembuatan laporan yang belum sesuai dengan standar dan juga belum mampu menciptakan transparansi kepada masyarakat.*

**Kata Kunci:** Evaluasi, Kinerja, Pertumbuhan Ekonomi

## **Abstract**

*This study aims to evaluate the performance carried out by the Concession Agency of Free Ports and Free Trade Zone in increasing economic growth in Karimun district. This research method uses descriptive qualitative research with unit analysis consisting of Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Karimun, Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun, PT Trimegah Perkasa Utama, dan PT Riau Alam Indonesia. The result of the study state that first, Karimuns BPKPBPB productivity cannot be achieved maximally because most programs are not implemented well. Second, service quality is quite good in terms of behavior and business licensing services. Third, the responsiveness of BPKPBPB Karimun in responding to community complaints is good through success in providing solutions that are in line with the needs of the community. Fourth, responsibility has not been maximized because the program was not fully implemented which caused the vision and mission of Karimuns BPKPBPB to not be achieved. Fifth, accountability has not been maximized because of the accountability of making reports that are not yet in accordance with the standards and have not been able to create transparency to the public.*

**Keywords:** evaluation, performance, economic growth

## 1. PENDAHULUAN

Free Trade Zone atau Kawasan Perdagangan Bebas merupakan pengembangan konsep Special Economic Zone (SEZ), dimana SEZ atau kawasan ekonomi khusus sebagai sebuah terminologi makro untuk kawasan yang ditetapkan untuk menyediakan lingkungan yang secara internasional kompetitif serta bebas dari berbagai hambatan berusaha dalam rangka memacu peningkatan ekspor nasional (Muzwardi, 2017). Free Trade Zone adalah wilayah dimana ada beberapa hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota dihapuskan dan mempermudah urusan birokrasi dengan harapan menarik bisnis baru dan investasi asing (Rade, 2014).

Indonesia mempunyai empat kawasan Free Trade Zone yaitu Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun. Keempat kawasan ini dibentuk atas pertimbangan pentingnya pengembangan wilayah regional untuk mendorong lalu lintas perdagangan internasional yang dapat memberikan manfaat bagi negara dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pariwisata, dan menarik penanaman modal dari dalam dan luar negeri (Pradhipta, 2016). Penetapan kawasan perdagangan bebas tersebut diharapkan mampu memberikan peningkatan terhadap perekonomian di Indonesia.

Mengembangkan kawasan perusahaan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Karimun (FTZ Karimun) adalah sebuah tantangan bagi Badan Pengusahaan Karimun (BPKPBPB) untuk dapat mengambil kebijakan strategis memilih the most

potential income untuk menggerakkan perekonomian kawasan, dan menarik investasi asing masuk (Renstra BPKPBPB Karimun 2013-2017). Implementasi peran Badan Pengusahaan (BPKPBPB) di Karimun masih mengalami keterlambatan jika dibandingkan dengan negara lain dimana dibuktikan dengan masih kurangnya infrastruktur yang jauh dari standar kelayakan (Renstra BPKPBPB Karimun 2013-2017).

Kekalahan BPKPBPB Karimun terhadap kinerja yang dilaksanakan juga terdapat pada kemampuan menarik daya tarik investor asing ke kawasan bebas Karimun. Pada tahun 2015 jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) yang ada di Kabupaten Karimun hanya berjumlah 20 perusahaan (BP Karimun, 2017) jumlah ini sangat jauh berada dibawah Kabupaten Bintan dengan jumlah PMA sebanyak 158 perusahaan (BP Bintan, 2015) dan Batam sebanyak 63 perusahaan (BP Batam, 2015) pada tahun yang sama. Selain investasi, pengelolaan pariwisata juga tidak berjalan dengan baik dimana terjadi penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung di kawasan tersebut sejak tahun 2015 (Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, 2018).

Dalam hal ini Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mempunyai wewenang dalam pengelolaan kawasan untuk mencapai tujuan pembentukan kawasan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kepri (2018) sejak tahun 2016 pertumbuhan ekonomi di wilayah FTZ terus mengalami

penurunan dengan meningkatnya persentase penduduk miskin dari 6,77% menjadi 7,41%.

Permasalahan ekonomi di Karimun juga ditandai dengan penurunan indeks pertumbuhan ekonomi oleh Badan Pusat Statistik Karimun (2018) sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Hal yang menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi di Karimun dikarenakan kondisi dimana salah satu perusahaan terbesar di Karimun melakukan pemberhentian hubungan kerja terhadap belasan ribu karyawan karena tidak adanya pesanan proyek yang diterima oleh perusahaan tersebut (Yudha, 2018). Dengan adanya pengurangan tenaga kerja menyebabkan jumlah pengangguran di Kabupaten Karimun meningkat yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi kawasan ini mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun

## **2. METODE**

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis evaluasi kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun ialah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian dimana meneliti suatu kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi dalam sistem pemikiran ataupun

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Hartadi, 2017).

Penelitian ini dilaksanakan pada Januari 2019 yang dilaksanakan di unit analisa penelitian. Unit analisa di dalam penelitian ini adalah organisasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun sebagai organisasi yang mengelola kawasan FTZ, PT Trimegah perkasa Utama, PT Riau Alam Indonesia sebagai perusahaan yang beroperasi di kawasan FTZ Karimun, Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Karimun sebagai dinas terkait yang berhubungan dengan penerapan FTZ.

Jenis data yang digunakan didalam pengumpulan data adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti dari obyek yang berhubungan langsung dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Data primer dalam penelitian ini adalah mengenai kinerja BPKPBBP dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun yang diambil melalui proses wawancara langsung kepada unit analisa penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah semua informasi mengenai kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Karimun yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari dokumen-dokumen, arsip, atau literatur terdahulu.

Adapun proses dalam teknik analisa data didalam penelitian ini

terdiri dari tiga langkah yaitu: a). Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi (Salim, 2006). Teknik reduksi data dilakukan untuk memilih data yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian sehingga pertanyaan peneliti dapat terjawab dengan baik. b). Penyajian data, yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Salim, 2006). c). Penarikan kesimpulan dan verifikasi, merupakan tahap akhir dari proses analisa data. Pada penarikan kesimpulan ini peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang diperoleh yang telah direduksi dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilah data yang mengarah kepada permasalahan serta menjawab permasalahan yang ada sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid (Hartadi, 2017).

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui bagaimana kapasitas kinerja BPKPBPB Karimun terhadap pekerjaan yang telah dijalankan. Dengan demikian Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Karimun akan dibahas menggunakan indikator kinerja dari Dwiyanto (2008) yang terdiri dari Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.

### **Produktivitas**

Produktivitas merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun dalam memenuhi keinginan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi pembentukan BPKPBPB. Untuk mencapai produktivitas yang baik diperlukan cara atau strategi agar hasil yang dicapai sesuai dengan perencanaan. Adapun strategi yang digunakan BPKPBPB Karimun untuk mencapai produktivitas yang tinggi ialah sebagai berikut:

1. Menyusun program sesuai dengan kebutuhan prioritas
2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah
3. Mengalokasikan sebagian besar dana untuk pembangunan infrastruktur

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas membuat enam program dalam membangun kawasan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Karimun. Dari berbagai program tersebut, program yang berhasil direalisasikan ialah sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Realisasi Program**

No	Program	Realisasi Kegiatan
1	Pengembangan dan peningkatan kelembagaan, aparatur/ sumber daya manusia	a. Mengadakan pelatihan <i>Geographic Information System</i> (GIS), pelatihan AMDAL (UKL/UPL), dan pelatihan Kehumasan. b. Inhouse Training tentang kepabeanan dengan narasumber Pejabat Bea dan Cukai.
2	Program pengembangan dan peningkatan infrastruktur kawasan BPKPBPB Karimun	a. Pembangunan jalan dan jembatan di wilayah pesisir selatan dari simpang Bukit Tembak sampai dengan Simpang RORO Parit Rampak b. Pembangunan jalan dan jembatan di wilayah pesisir utara dari simpang PT. Panin sampai dengan PT. Karimun Sembawang Shipyard dan PT. Oiltanking

Sumber: BP Karimun, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi pelaksanaan program yang terdapat di BPKPBPB Karimun sangat kurang. Dari enam program yang direncanakan, hanya dua program yang terealisasi. Program yang berhasil direalisasikan ialah program pengembangan dan peningkatan kelembagaan, aparatur/ sumber daya manusia dan program pengembangan dan peningkatan infrastruktur kawasan BPKPBPB Karimun.

Dari kegiatan tersebut output yang dihasilkan ialah menambah kemampuan pegawai dalam mengelola kawasan dari segi penataan ruang. BPKPBPB Karimun berhasil membagikan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menjadi beberapa bagian berdasarkan potensi lahan. Kemudian output yang dihasilkan dari pelaksanaan pengembangan infrastruktur jalan adalah terhubungannya akses jalan antara perusahaan KPBPB Karimun dengan pelabuhan Roro sebagai pintu utama Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas Karimun (Laporan Tahunan BP Karimun, 2017).

Secara umum kinerja BPKPBPB Karimun berdasarkan tingkat produktivitas dinilai masih kurang. Rendahnya tingkat produktivitas disebabkan oleh program yang telah direncanakan tidak berjalan dengan baik sehingga menyebabkan output yang dihasilkan menjadi tidak maksimal. Selain itu, BPKPBPB Karimun tidak membuat laporan pencapaian target secara jelas sehingga tingkat produktivitas yang dimiliki Badan tersebut tidak dapat diukur dalam bentuk angka. Hal ini memberikan dampak pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun yang sampai saat ini masih belum mampu menyaingi kawasan bebas yang ada didalam negeri maupun luar negeri dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik bahkan negara.

## Kualitas Layanan

Kinerja suatu organisasi pelayanan publik juga ditentukan oleh kualitas layanan yang diberikan. Baik dan buruknya suatu layanan ditentukan oleh kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat penerima jasa layanan.

Perilaku pegawai merupakan salah satu unsur untuk mengukur kualitas layanan yang diberikan BPKPBPB Karimun terhadap penerima jasa layanan yaitu perusahaan. Perilaku pegawai dalam menjaga kesopanan diterapkan dengan cara mengutamakan senyum, sapa, dan salam. Kemampuan BPKPBPB Karimun dalam menjaga kesopanan mendapatkan respon yang baik dari pihak perusahaan.

Selain kesopanan, perilaku pegawai juga dinilai berdasarkan tingkat kejujuran dan kedisiplinan BPKPBPB Karimun. Untuk menjaga kualitas kejujuran pegawai BPKPBPB Karimun menerapkan sistem online di dalam

proses keuangan yang diterima. Terkait fasilitas pembebasan pajak yang diberikan kepada perusahaan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun juga berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kualitas layanan juga dinilai berdasarkan tingkat kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas. Untuk menjaga kedisiplinan dalam memberikan pelayanan, BPKPBPB Karimun menerapkan sistem finger print. Sistem ini diterapkan sebagai absensi agar pegawai yang datang dan pulang kantor tepat waktu. Untuk menjaga kedisiplinan BPKPBPB Karimun juga menerapkan pemberian sanksi kepada pegawai yang dengan sengaja melanggar aturan.

Perbaikan kualitas layanan perijinan usaha dibuktikan dengan peningkatan jumlah investasi yang masuk ke kawasan Karimun.



Grafik 1. Realisasi Investasi Di KPBPB Karimun Tahun 2009-2017

Sumber: BP Karimun, 2017

Selain memproses perijinan usaha, BPKPBPB Karimun juga bertugas memberikan pelayanan dibidang percepatan pengembangan kawasan agar mampu bersaing dengan kawasan sejenis di negara lain dengan cara membangun infrastruktur. Usaha BPKPBPB Karimun dalam meningkatkan pelayanan melalui pembangunan infrastruktur dengan cara membangun jalan di Kawasan PBPB Karimun. Pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di KPBPB Karimun merupakan porsi terbesar dari keseluruhan kegiatan yang berasal dari dana APBN yaitu mencapai 86%. Pelaksanaan pembangunan jalan cukup baik. Namun karena masih ada beberapa infrastruktur lainnya yang belum memiliki fasilitas memadai. Kekurangan biaya yang diterima merupakan sebab keterlambatan pembangunan dan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam waktu cepat.

Tugas BPKPBPB Karimun selanjutnya ialah melakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi melalui pariwisata. Pelayanan pengembangan pariwisata oleh BPKPBPB Karimun tersebut belum dapat berjalan sepenuhnya. Keterbatasan anggaran merupakan faktor penghambat pelaksanaan pengembangan pariwisata. Selain itu pengelolaan pariwisata yang ada di kawasan PBPB Karimun belum ada koordinasi dengan dinas terkait. Koordinasi dalam mengembangkan pariwisata kawasan sangat diharapkan untuk menjadikan kawasan sebagai kawasan wisata kelas dunia dapat berjalan maksimal.

Hasil analisis kualitas layanan yang diberikan BPKPBPB Karimun sebagai indikator pengukuran kinerja berjalan cukup baik. Perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan sudah baik namun masih terdapat kekurangan dari bentuk layanan seperti pengembangan infrastruktur dan pariwisata.

### **Responsivitas**

BPKPBPB Karimun menganggap masukan yang diterima oleh masyarakat sangat berperan penting terhadap perbaikan pelayanan dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik. upaya mereka menjaga kualitas responsivitas kinerja yang dijalankan ialah menerima keluhan secara terbuka dari masyarakat maupun perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. kegiatan tersebut dilaksanakan setiap tiga bulan sekali dengan maksud agar segala spirasi dapat tersampaikan secara langsung.

Penilaian perusahaan selaku penerima jasa layanan terhadap sikap BPKPBPB Karimun dalam menerima keluhan sudah baik. Pihak perusahaan diberikan ruang untuk menyampaikan keluhan didalam forum diskusi. Keluhan tersebut diterima dengan baik oleh BPKPBPB Karimun, kemudian diberikan solusi atau rekomendasi agar dapat diselesaikan. keluhan yang disampaikan masyarakat terkait jalan yang rusak langsung direspon oleh BPKPBPB Karimun dengan cara melakukan pembangunan jalan guna memudahkan masyarakat maupun pihak perusahaan untuk melakukan kegiatan ekonomi di

Kawasan PBBP Karimun. Solusi dari keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang sudah rusak tersebut yaitu dengan cara menyusun program pembangunan jalan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Selain jalan keluhan yang berhasil diatasi BPKPBBP ialah terkait pelaksanaan perijinan secara online. Kemampuan BPKPBBP Karimun dalam memberikan solusi ditunjukkan dengan mengadakan suatu pelatihan kepada perusahaan agar proses perijinan usaha melalui sistem online dapat berjalan lebih efektif.

Kinerja BPKPBBP Karimun berdasarkan responsivitas sudah baik. sikap dan solusi yang diberikan dapat membuat masyarakat pengguna jasa layanan merasa puas. Solusi yang dihasilkan juga mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat maupun perusahaan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

### **Responsibilitas**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun bahwa sebagian wilayah yang ada di Kabupaten Karimun merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Karimun menetapkan Visi yaitu "Terwujudnya Kabupaten Karimun sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim yang Terdepan Berlandaskan Iman dan Taqwa". Berlandaskan visi Kabupaten Karimun tersebut, Badan Pengusahaan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menetapkan visi yang sejalan dengan visi Kabupaten Karimun yaitu "Mewujudkan BP Karimun sebagai Pengelola Kawasan Industri Maritim Kelas Dunia". Agar visi dan misi BPKPBBP Karimun dapat tercapai maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus berlandaskan visi dan misi tersebut.

Permasalahan yang dihadapi BPKPBBP Karimun ialah dari segi implementasi dalam bentuk program yang belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan sehingga tugas-tugas tersebut tidak berjalan dengan baik. oleh karena itu, kinerja BPKPBBP Karimun berdasarkan tingkat resposibilitas dinilai masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh pencapaian hasil dari program tersebut belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Pencapaian program yang belum maksimal menyebabkan visi dan misi BPKPBBP Karimun sebagai pengelola kawasan industri maritim kelas dunia belum tercapai.

### **Akuntabilitas**

Menurut Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Nomor 2 Tahun 2008 dalam Pasal 2 Ayat 2 yaitu Badan Pengusahaan Karimun berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Dewan Kawasn. Berdasarkan peraturan tersebut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun berkewajiban melaporkan evaluasi kegiatan kepada Dewan Kawasan yang diketuai oleh

Gubernur Kepulauan Riau. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan BPKPBPB Karimun berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap tiga bulan (laporan triwulan) dan setiap tahun (laporan tahunan). Laporan tersebut digunakan sebagai bentuk evaluasi kinerja dari BPKPBPB Karimun selama satu tahun pelaksanaan kegiatan.

Proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKPBPB Karimun terdiri dari evaluasi eksternal dan evaluasi internal. Evaluasi eksternal merupakan bentuk evaluasi lapangan yang dilaksanakan BPKPBPB Karimun untuk mengetahui perkembangan dan hambatan yang dihadapi investor selama beroperasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Sedangkan untuk evaluasi internal yaitu merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BPKPBPB Karimun kepada Dewan Kawasan dalam bentuk laporan tahunan untuk mengetahui keberhasilan kinerja selama satu tahun.

Laporan kinerja merupakan bentuk tanggung jawab untuk melaporkan capaian kinerja yang pelaksanaannya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, laporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam hal ini untuk mengukur akuntabilitas kinerja hal yang harus dilakukan ialah membuat laporan capaian kinerja dan realisasi anggaran.

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap dokumen laporan kinerja yang dibuat oleh BPKPBPB Karimun ditahun 2017 bahwa laporan tahunan tersebut belum memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan didalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. beberapa informasi yang ditampilkan didalam Laporan Tahunan BPKPBPB Karimun masih belum lengkap dan belum sesuai dengan isi yang harus dicantumkan didalam laporan tersebut.

Transparansi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas agar masyarakat bisa memperoleh informasi dengan mudah. BPKPBPB Karimun telah membuat website sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

Namun transparansi yang diberikan melalui website tersebut belum berjalan maksimal. Pengelolaan website hanya berisikan informasi kegiatan dalam bentuk berita. Konten-konten yang seharusnya disediakan sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Portal dan Situs WEB Badan Pemerintahan tidak disediakan didalam website milik BPKPBPB Karimun.

Hasil analisis peneliti mengenai akuntabilitas BPKPBPB Karimun dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat dan pemerintah belum berjalan maksimal. Hal tersebut terjadi karena pelaksanaan evaluasi melalui laporan tahunan dan juga transparansi yang diberikan kepada masyarakat belum mampu dilaksanakan

BPKPBPB Karimun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun belum berjalan maksimal. Hal ini karena beberapa indikator pengukur kinerja belum berhasil dijalankan dengan baik. Kendala BPKPBPB Karimun dalam melaksanakan kinerja disebabkan oleh dua faktor yaitu keterbatasan anggaran dan kekurangan jumlah pegawai.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja BPKPBPB Karimun dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Karimun maka peneliti memberikan saran yaitu meningkatkan pencapaian hasil dengan merealisasikan kegiatan yang lebih maksimal dari sebelumnya, membangun kawasan infrastruktur yang lebih baik untuk meningkatkan daya tarik investor, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja agar tujuan pembentukan kawasan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, meningkatkan kemampuan pegawai melalui pelatihan pembuatan laporan yang sesuai dengan standar aturan yang ditetapkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja BPKPBPB Karimun, dan meningkatkan pengelolaan website sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Dwiyanto, Agus, dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Muzwardi, Ady. (2017). *Free Trade Zone menuju kawasan ekonomi Khusus di Batam, Bintan, dan Karimun*. Yogyakarta : Expert.
- Salim, Agus. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Tiara Wacana

### **Skripsi dan Jurnal**

- Hartadi, B. S. (2017). *Evaluasi Kinerja Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Retrieved from <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11895>
- Pradhipta, R. M. W. A. (2016). *Sinergi Kawasan Perdagangan Dan Pariwisata Dalam Pembangunan Destinasi Studi Kasus : Pengembangan Kawasan Wisata Nongsa, Batam*. Universitas Gadjah Mada. Retrieved from [http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=84118&obyek\\_id=4](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=84118&obyek_id=4)
- Rade, Y. L. (2014). *Eveluasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang*. Retrieved from <http://jurnal.umrah.ac.id/?p=3213>

### **Internet**

- [http://www.academia.edu/4244798/Draf\\_Lap\\_Akhir\\_Renstra\\_Kawasan\\_Perdagangan\\_Bebas\\_dan\\_Pelabuhan\\_Bebas\\_Karimun](http://www.academia.edu/4244798/Draf_Lap_Akhir_Renstra_Kawasan_Perdagangan_Bebas_dan_Pelabuhan_Bebas_Karimun) diakses 29 September 2018

Yudha, 2017. Indeks Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karimun Terus Alami Penurunan.  
<https://batamtoday.com/home/read/118739/Indeks-Pertumbuhan-Ekonomi-Kabupaten-Karimun-Terus-Alami-Penurunan> diakses 2 Januari 2019

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Portal dan Situs WEB Badan Pemerintahan.

Peraturan Dewan Kawasan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

### **Lain-lain**

Laporan tahunan BP Karimun Tahun 2017

Rencana Strategis BP Karimun Tahun 2013-2017

### **Profil Penulis**

Desy Pratiwi lahir di Tanjung Balai Karimun pada 1 Desember 1996. saat ini sedang melaksanakan studi di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.